

ADAPTASI SEKOLAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI

SCHOOL ADAPTATION TO THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION

Mardiana¹, Ahmad Khoiri²

^{1,2}PGSD Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Melawi
^{1,2}Jl. RSUD Melawi KM 4 Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat
Email: mardialeona@gmail.com¹, ahmadkhoiri2290@gmail.com²

Submitted: 17-03-2021, Revised: 08-6-2021, Accepted: 11-06-2021

Abstrak

Beberapa sekolah negeri dan swasta di Nanga Pinoh Kabupaten Melawi memiliki siswa berkebutuhan khusus dan menyelenggarakan pendidikan inklusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pendidikan inklusi dilaksanakan di sekolah dengan legalitas penyelenggaraan pendidikan inklusi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian dipilih secara purposive sampling yang terdiri dari lima kepala sekolah, satu guru, satu siswa di sekolah inklusi, orang tua siswa berkebutuhan khusus dan siswa reguler. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan adaptasi penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk pembelajaran kedepannya akan menyesuaikan dengan kondisi atau lingkungan saat ini, kebutuhan siswa, dan tindakan sekolah untuk pencapaian tujuan tetap memberikan pelayanan bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus dengan melibatkan guru kelas dan wali kelas sebagai pendamping dalam proses pembelajaran dan memenuhi sarana dan prasarana seadanya yang ada di sekolah serta menjaga keseimbangan dengan menjaga komitmen antara guru, sekolah, dan orang tua. Selain legalitas yang didapat sekolah, diperlukan juga kerjasama dan dukungan pemerintah untuk memberikan penyediaan sumber pendukung lainnya agar proses sesuai dengan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Kata Kunci: *Adaptasi, Sekolah, Kebijakan, Pendidikan Inklusi*

Abstract

Several public and private elementary schools in Nanga Pinoh Melawi Regency have students with special needs and carry out inclusive education. This study aimed to investigate the extent of inclusive education implemented in schools with the legality of implementing inclusive education by the Head of Melawi District Education Office. This study was qualitative research using a case study approach. The research subjects were selected using purposive sampling consisting of five principals, one teacher, one student in inclusive schools, and parents of a student with special need and a regular student. Data analysis used was interactive analysis by Miles and Huberman. The results indicated that the adaptation of inclusive education for future learning would adjust to the current conditions or environment, students' needs, and school actions to achieve the goal by continuing to provide guidance services for students with special needs by involving class and guardian teachers as companions in the learning process, fulfilling basic facilities, and maintaining balance by maintaining the commitment between teachers, school, and parents. In addition, aside from the legality obtained, the schools also require cooperation and government support to provide other supporting resources to process following the guidelines for implementing inclusive education.

Keywords: *Adaptation, Schools, Policy, Inclusive Education*

How to Cite: Mardiana, & Khoiri, A. (2021). Adaptasi Sekolah terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 8(1), 77-90.

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan bagian terpenting untuk membentuk seorang manusia menjadi lebih baik didalam berbagai aspek kehidupan, dan sebagai hak dasar bagi setiap individu untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Maka dari itu, masyarakat wajib mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dari pemerintah, termasuk bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Permasalahan yang sering muncul terhadap anak berkebutuhan khusus dengan perbedaan mental dan fisik, sehingga terjadinya diskriminasi yang akan menghambat perkembangan belajar anak dan akan tersingkir dalam berinteraksi dengan siswa non-ABK serta masyarakat. Semakin berkembangnya tuntutan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk dapat diperlakukan sama haknya dengan anak lainnya, maka muncullah konsep pendidikan inklusi dan kebijakan Pemerintah Indonesia tentang pendidikan inklusi.

Menurut John dalam Prasetya, Rahman, Adityawati, & Islamiyah (2018: 2), pendidikan inklusi adalah sebuah sistem pendidikan agar anak berkebutuhan khusus dapat belajar di sekolah umum yang ada di lingkungan mereka dan sekolah tersebut dilengkapi dengan layanan pendukung serta pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Pendidikan inklusi pada tingkat sekolah dasar perlu mendapatkan perhatian khusus. Sekolah inklusif adalah sekolah umum yang menerima siswa berkebutuhan khusus (Ediyanto, Atika, Kawai, & Prabowo, 2017). Sekolah inklusif merupakan wadah dalam rangka membangun komitmen bersama untuk dapat menerima dan menghargai keragaman yang dimiliki setiap anak khususnya anak berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusi merupakan bagian penting bagi dunia pendidikan di Indonesia yang membawa perubahan dalam pemenuhan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1), mengatakan bahwa setiap yang menjadi warga Negara berhak memperoleh pendidikan. PP nomor 19 tahun 2005 merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang standar nasional pendidikan, pasal 41 ayat (1) bahwa setiap sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi sebaiknya mempunyai guru yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan bagi siswa dengan berkebutuhan khusus (Depdiknas, 2005). Menurut Rasmitadila & SuryantiTambunan (2018: 368-369), yang termasuk kategori sekolah inklusif adalah sekolah memiliki ketersediaan guru yang baik, komitmen, dan terampil dalam membimbing serta memenuhi kebutuhan siswa dengan keberagaman.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) juga diatur oleh UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu warga negara yang mempunyai kelainan emosional, fisik, mental, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus dan penyelenggaraannya dilakukan secara inklusif atau satuan pendidikan khusus (Depdiknas, 2003). Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa ABK adalah anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya (Depdiknas, 2009). Sedangkan menurut Lundqvist, Westling, & Siljehag (2016: 125), anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik.

Pendidikan inklusif memberikan pelayanan pendidikan semua anak, baik ABK maupun non-ABK agar dapat belajar bersama-sama di satuan pendidikan umum

(Firman, 2020; Putro, Suharto, & Maslamah, 2020; Tran, Pham, Mai, Le, & Nguyen, 2019; Tuncay & Kizilaslan, 2021). Dengan pelayanan pendidikan tetap memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual siswa. Amka (2018: 118) berpendapat bahwa semangat yang dibangun dalam pendidikan inklusif adalah memberi akses yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Adapun siswa yang mendapat pelayanan pendidikan inklusif adalah anak tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, tunaganda, autisme, gangguan motorik, dan kelainan lainnya.

Anak-anak berkebutuhan yang bersekolah di sekolah dasar negeri atau formal yang ada di Nanga Pinoh sebagian besar tidak menyelesaikan pendidikannya dikarenakan banyak faktor, diantaranya yaitu ABK tidak mampu mengikuti kegiatan pembelajaran, orang tua yang kurang mendukung dalam membimbing kekurangan anaknya dan menolak untuk menyekolahkan anaknya di SLB, serta sekolah yang tidak memiliki guru pendamping khusus, sehingga sepenuhnya kegiatan proses belajar mengajar dan pendampingan dilakukan oleh guru kelas. Menurut pengakuan salah satu guru wali kelas di SDN 04 Nanga Pinoh, bahwa kami memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam membimbing anak yang memiliki berkebutuhan khusus, seharusnya ABK itu memerlukan perhatian khusus dan ekstra agar pembelajaran untuk ABK dapat berjalan secara maksimal serta sekolah juga harus mempersiapkan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi, selain itu perlunya adaptasi yang harus dilakukan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.

SDS Muhammadiyah Nanga Pinoh merupakan sekolah dasar pertama yang mendapatkan SK ijin menyelenggarakan pendidikan inklusi di Kabupaten Melawi, selain itu terdapat Sekolah Luar Biasa (SLB) milik Yayasan Kesusteran yang dapat menerima ABK untuk memperoleh pendidikan, akan tetapi tidak semua ABK dapat sekolah di SLB tersebut dikarenakan ABK memiliki beragam latar belakang agama. Sehingga, ada keterbatasan untuk bersekolah di SLB Yayasan Kesusteran. Sebaliknya ABK yang bersekolah di sekolah dasar negeri mengalami kendala yaitu putus sekolah karena tidak mampu mengikuti siswa non-ABK, tidak adanya guru pendamping khusus, keterbatasan guru kelas dan pemahaman dalam membimbing ABK, dan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan inklusi.

Terselenggaranya pendidikan inklusi di SDS Muhammadiyah Nanga Pinoh atas pengajuan dari kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi. Ijin penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dengan SK nomor 19 tahun 2020 tentang penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi Kabupaten Melawi.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di SDS Muhammadiyah dilatarbelakangi oleh jumlah ABK lebih banyak dibanding dengan sekolah dasar lainnya, bersedia menerima ABK, kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya yang memiliki berkebutuhan khusus, serta adanya perhatian, pelayanan, dan pendampingan oleh wali kelas, guru, serta kepala sekolah dalam pelayanan pendidikan dan pada saat proses pembelajaran.

SDS Muhammadiyah Nanga Pinoh sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, guru-guru harus dapat beradaptasi dengan adanya ABK dan anak normal lainnya dan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh sekolah terkait pendidikan inklusi. Bukan suatu hal yang tidak mungkin dengan penyelenggaraan pendidikan

inklusi banyak kendala yang akan dihadapi sekolah. Salah satunya dialami oleh SDS Muhammadiyah Nanga Pinoh.

SDS Muhammadiyah Nanga Pinoh banyak mengalami kendala, dan begitu juga dengan sekolah lainnya yang ada di Nanga Pinoh belum sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi. Permasalahan yang terjadi sekolah-sekolah dasar di Nanga Pinoh ialah sekolah-sekolah yang memiliki anak ABK mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan pendidikan inkulis dikarenakan belum memiliki pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Selanjutnya hasil penelitian dari Agustin (2019: 72) dan Anjarsari, Efendy, & Sulthoni (2018: 91) menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusi masih mengalami kendala dan belum terselenggara dengan baik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat hal penting, yaitu guru kurang memahami ciri-ciri anak berkebutuhan khusus, masih kurangnya pelatihan yang didapat oleh guru umum mengenai pendidikan inklusi, dan kurangnya guru pendamping khusus. Hasil penelitian ini sebagai rujukan bahwa terdapat permasalahan yang serupa sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini yaitu tempat, subjek penelitian, dan adanya ijin penyelenggaraan pendidikan inklusi, serta adanya pendampingan yang dilakukan oleh guru kelas dan kepala sekolah SDS Muhammdiyah kepada ABK. Kondisi seperti ini yang menjadi kendala pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan pedomannya.

Berdasarkan dari permasalahan dan latar belakang di atas tujuan penelitian ini ingin melihat sejauh mana sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusi yang mendapatkan legalitas penyelenggaraan pendidikan inklusi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi meskipun sarana dan prasarana yang masih kurang untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Sehingga, penelitian ini dirasa penting untuk dikaji guna untuk mengetahui sejauhmana sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Nanga Pinoh.

2. Metode Penelitian

Tempat penelitian di lima sekolah dasar yang terdapat di Nanga Pinoh memiliki Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan penyelenggara pendidikan inklusi. Adapun lima sekolah tersebut, sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Nama Sekolah

No.	Nama Sekolah	Tempat
1	SDN 04 Nanga Pinoh	Kota Nanga Pinoh
2	SDN 19 Tanjung Tengang	Pinoh Utara
3	SDN 09 Tanjung Lay	Pinoh Selatan
4	SDN 14 Kelakik	Nanga Pinoh
5	SDS Muhammadiyah Nanga Pinoh	Nanga Pinoh

Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus yang pengumpulan data pertama melakukan observasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan Inklusi. Kedua, melakukan wawancara untuk mencari informasi terkait adaptasi pelaksanaan pendidikan inklusi pada sekolah dasar di Nanga Pinoh, tindakan sekolah dalam mencapai tujuan,

dan pemeliharaan menuju keseimbangan. Ketiga, dokumentasi terkait tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh dokumen dan persyaratan legalitas penyelenggaraan pendidikan inklusi berupa SK ijin penyelenggaraan pendidikan inklusi. Subyek penelitian diambil secara *purposive sampling* sesuai dengan karakteristik khusus, terdiri dari lima orang kepala sekolah, satu guru, satu siswa disekolah inklusi dan satu orang tua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan satu siswa reguler.

Teknik analisis interaktif milik Miles dan Huberman yang digunakan sebagai analisis data (Sugiyono, 2018: 321). Adapun tahapan dalam pengumpulan data terdiri dari: (1) tahap reduksi data, tahap ini difokuskan pada adaptasi sekolah terhadap kebijakan pendidikan inklusi, tindakan sekolah dalam mencapai tujuan dan pemeliharaan menuju keseimbangan, (2) penyajian data dengan bentuk bagan dan teks naratif untuk membuktikan kebenaran dari jawaban yang diajukan peneliti, dan (3) memverifikasi data melalui bukti-bukti di lapangan. Teknik pemeriksaan, kredibilitas, keteralihan, ketergantungan, dan konfirmabilitas merupakan keabsahan data dalam penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Adaptasi Sekolah terhadap Usulan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada SD di Nanga Pinoh

Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima kepala sekolah dasar di Nanga Pinoh yang memiliki anak berkebutuhan khusus ditemukan hanya satu sekolah dasar yang melaksanakan pendidikan inklusi di Kabupaten Melawi. Adapun proses wawancara tersebut, sebagai berikut:

SKIP WAWANCARA		SKIP WAWANCARA	
Pewawancara : Mardiana	Narasumber : Kepsk SDN 19 Tanjung Tengah	Pewawancara : Mardiana	Narasumber : Kepsk SDS Muhammadiyah Nanga Pinoh
Pewawancara : Apakah di sekolah yang bapak/ibu pimpin terdapat siswa/ anak berkebutuhan khusus ?	Narasumber : Ada bu tapi tidak banyak	Pewawancara : Apakah di sekolah yang bapak/ibu pimpin terdapat siswa/ anak berkebutuhan khusus ?	Narasumber : Ada
Pewawancara : Berapa jumlah anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah Bapak/Ibu ?	Narasumber : Hanya 1 orang itupun anak guru yang mengajar di sini	Pewawancara : Berapa jumlah anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah Bapak/Ibu ?	Narasumber : Kalau untuk saat ini yang ada tinggal 3 orang
Pewawancara : Termasuk dalam kategori apa ABK yang ada di sekolah Bapak/Ibu ?	Narasumber : Kurang tahu pasti, tapi kalau saya lihat anak itu masuk dalam kategori kesulitan belajar	Pewawancara : Termasuk dalam kategori apa ABK yang ada di sekolah Bapak/Ibu ?	Narasumber : Dari 3 ABK itu beda-beda bu, ada yang masuk kategori gangguan dalam bicara, kesulitan belajar, dan ada yang down sidrom.
Pewawancara : Apakah sekolah yang Bapak/Ibu pimpin menyelenggarakan pendidikan inklusi ?	Narasumber : Kami belum menyelenggarakan pendidikan inklusi	Pewawancara : Apakah sekolah yang Bapak/Ibu pimpin menyelenggarakan pendidikan inklusi ?	Narasumber : Ada bu, kita baru mengajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi. Alhamdulillah SK penyelenggaraan sudah di keluarin tahun kemaren 2020.
Pewawancara : Bagaimana proses penyelenggaraan inklusi ?	Narasumber : Ya tidak ada bu, guru yang mengajar ABK itu seperti biasa mengajar siswa yang lain hanya kadang-kadang gurunya focus ke anak itu.	Pewawancara : Bagaimana proses penyelenggaraan inklusi ?	Narasumber : Selama ini kami memberikan pelayanan dan bimbingan sesuai dengan kemampuan, karena keterbatasan guru pendamping khusus. Wali kelas yang membimbing ABK kadang guru kelas, dan sedikit terbantu jika ada mahasiswa yang PPL disini juga kami libatkan, terkadang saya sendiri yang juga ikut membimbing anak-anak.
Pewawancara : Upaya yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan ?	Narasumber : Ya tidak ada bu, kami tetap mengajar siswa-siswa seperti biasanya.	Pewawancara : Upaya yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan ?	Narasumber : Kami selalu beradaptasi dengan kebutuhan dan lingkungan siswa, dan tetap memberikan pelayanan meskipun dengan keterbatasan guru pendamping, dan sarana prasarana
Pewawancara : Tindakan sekolah mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi ?	Narasumber : Selama ini yang kami lakukan khususnya wali kelas nya tetap memberikan pendampingan semaksimal mungkin kepada siswa tersebut	Pewawancara : Tindakan sekolah mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi ?	Narasumber : Kami tetap memberikan pelayanan dan bimbingan kepada ABK sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa, untuk kedepannya kami akan memberikan atau mengintru guru-guru untuk pelatihan tentang pendidikan inklusi serta menyelidiki guru pendamping khusus.
Pewawancara : Bagaimana pemeliharaan agar menuju keseimbangan penyelenggaraan pendidikan inklusi?	Narasumber : Bagaimana ya bu, karena kami tidak menyelenggarakan pendidikan inklusi secara khusus jadi kami tetap menerima dan memberikan pembelajaran pada siswa yang berkebutuhan khusus sama dengan siswa lainnya , kebetulan juga siswa tersebut anak salah satu guru di sini jadi ibu nya tahu kekurangan anaknya, dan kami juga menjaga hubungan baik dengan guru-guru yang lain.	Pewawancara : Bagaimana pemeliharaan agar menuju keseimbangan penyelenggaraan pendidikan inklusi?	Narasumber : Sekolah kami tetap memberikan pelayanan dan pendampingan khusus untuk ABK yang sangat membutuhkan, dengan tetap menjaga komitmen antara guru, sekolah, dan orang tua.

SKIP WAWANCARA

Pewawancara : Mardiana
 Narasumber : Kepssek SDN 04 Nanga Pinoh

Pewawancara	Apakah di sekolah yang bapak/Ibu pimpin terdapat siswa/ anak berkebutuhan khusus ?
Narasumber	Ada bu
Pewawancara	Berapa jumlah anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah Bapak/Ibu ?
Narasumber	1 orang bu
Pewawancara	Termasuk dalam kategori apa ABK yang ada di sekolah Bapak/Ibu ?
Narasumber	Anak itu seperti down sidromi bu
Pewawancara	Apakah sekolah yang Bapak/Ibu pimpin menyelenggarakan pendidikan inklusi ?
Narasumber	Tidak ada bu, karena hanya 1 siswa abk dan kendalanya sekolah tidak memiliki guru khusus
Pewawancara	Bagaimana proses penyelenggaraan inklusi ?
Narasumber	Di sekolah kami tidak menyelenggarakan pendidikan inklusi bu
Pewawancara	Upaya yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan ?
Narasumber	Tidak ada
Pewawancara	Tindakan sekolah mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi ?
Narasumber	Tidak ada bu, dengan adanya satu anak berkebutuhan khusus saja kita hanya mampu berikan pelayan dan bimbingan melalui wali kelasnya.
Pewawancara	Bagaimana pemeliharaan agar menuju keseimbangan penyelenggaraan pendidikan inklusi?
Narasumber	Selama ini dengan adanya satu anak berkebutuhan khusus kami tetap memberikan pendidikan dan pelayanan sama dengan siswa lainnya.

SKIP WAWANCARA

Pewawancara : Mardiana
 Narasumber : Kepssek SDN 14 Kelakik

Pewawancara	Apakah di sekolah yang bapak/Ibu pimpin terdapat siswa/ anak berkebutuhan khusus ?
Narasumber	Semester kemaren kita masih ada, tapi untuk saat ini anak tersebut mengundurkan diri
Pewawancara	Berapa jumlah anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah Bapak/Ibu ?
Narasumber	Hanya 1 orang saja bu
Pewawancara	Termasuk dalam kategori apa ABK yang ada di sekolah Bapak/Ibu ?
Narasumber	Anaknya hanya mengalami kesulitan belajar bu
Pewawancara	Apakah sekolah yang Bapak/Ibu pimpin menyelenggarakan pendidikan inklusi ?
Narasumber	Tidak ada bu, bagaimana mau menyelenggarakan siswa ABK hanya 1 orang itu pun sudah mengundurkan diri
Pewawancara	Bagaimana proses penyelenggaraan inklusi ?
Narasumber	Tidak ada bu
Pewawancara	Upaya yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan ?
Narasumber	Tidak ada, selama siswa itu sekolah di sini wali kelasnya tetap memberikan bimbingan sebatas kemampuan gurunya
Pewawancara	Tindakan sekolah mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi ?
Narasumber	Selama siswa ABK bersekolah di sini, kami tetap memberikan pelayanan meskipun tidak ada guru khusus
Pewawancara	Bagaimana pemeliharaan agar menuju keseimbangan penyelenggaraan pendidikan inklusi?
Narasumber	Tidak ada secara khusus bu, selama siswa itu sekolah di sini kami hanya bisa memberikan pendidikan dan pelayanan semaksimal mungkin sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan saat ini

SKIP WAWANCARA

Pewawancara : Mardiana
 Narasumber : Kepssek SDN 09 Tanjung Lay

Pewawancara	Apakah di sekolah yang bapak/Ibu pimpin terdapat siswa/ anak berkebutuhan khusus ?
Narasumber	Ada
Pewawancara	Berapa jumlah anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah Bapak/Ibu ?
Narasumber	1 orang bu
Pewawancara	Termasuk dalam kategori apa ABK yang ada di sekolah Bapak/Ibu ?
Narasumber	Hiperaktif
Pewawancara	Apakah sekolah yang Bapak/Ibu pimpin menyelenggarakan pendidikan inklusi ?
Narasumber	Kita tidak ada secara khusus menyelenggarakan pendidikan inklusi, kita layani anak-anak sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya
Pewawancara	Bagaimana proses penyelenggaraan inklusi ?
Narasumber	Tidak ada bu
Pewawancara	Upaya yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan ?
Narasumber	Tidak ada bu
Pewawancara	Tindakan sekolah mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi ?
Narasumber	Selama siswa ada ABK ada di sekolah kami memberikan pelayanan sesuai dengan kondisi siswa, yang mendampingi wali kelasnya dan guru-guru kelas lainnya
Pewawancara	Bagaimana pemeliharaan agar menuju keseimbangan penyelenggaraan pendidikan inklusi?
Narasumber	Karena sekolah kami tidak menyelenggarakan pendidikan inklusi, jadi tidak ada pemeliharaan yang kami lakukan, hanya selama ini sekolah tetap memberikan pembelajaran kepada ABK sesuai dengan kondisi siswa dan menjalin kerjasama dengan guru dan wali siswa

Gambar 1. Skrip Proses Wawancara

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari lima sekolah dasar yang memiliki ABK hanya satu sekolah yang memiliki SK penyelenggara pendidikan inklusi dan sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi tidak memiliki guru pendamping khusus. Tidak hanya itu, sarana, prasarana, dan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi belum sesuai sebagaimana mestinya. Sehingga, sekolah dasar negeri dan swasta selama ini menangani dan melayani anak berkebutuhan khusus berjalan dengan apa adanya sesuai dengan kemampuan wali kelas dan guru mata pelajaran.

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi adalah SDS Muhammadiyah Nanga Pinoh yang mengajukan usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi, mengingat bahwa di tahun sebelum usulan tersebut terdapat ABK. Agar penyelenggaraan pendidikan inklusi diakui secara legal dan akan dibuat pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi, maka diperlukan adanya SK untuk melegalitaskan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Usulan tersebut disambut baik oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi.

Data sekolah penyelenggaran pendidikan inklusi di Nanga Pinoh dapat dilihat pada table berikut:

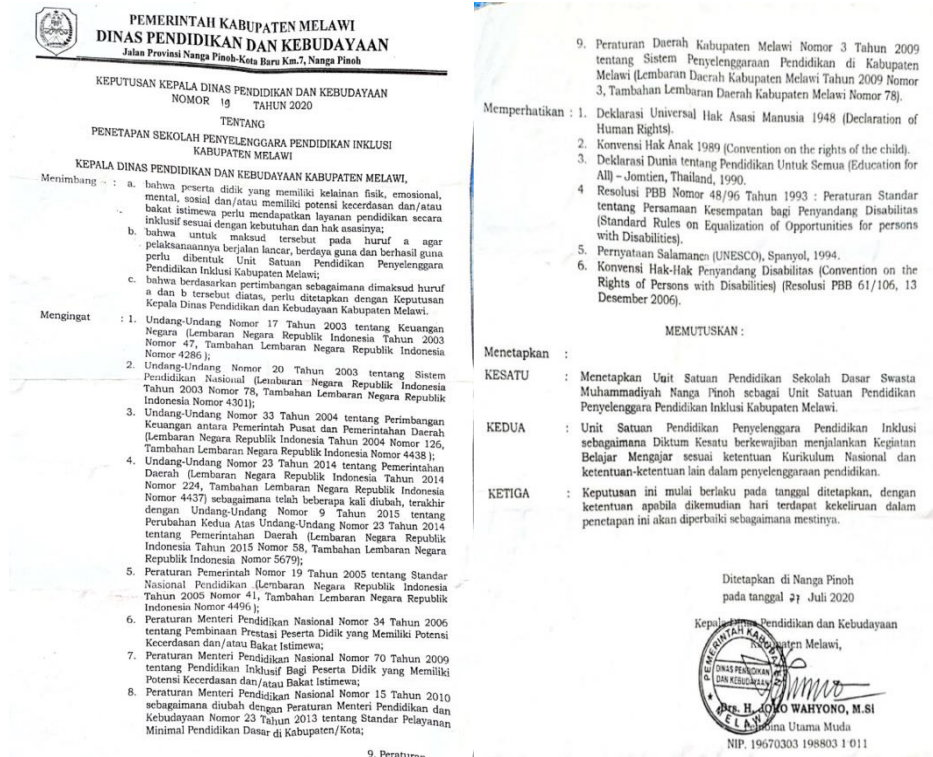
Tabel 1. Data Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi

No.	Nama Sekolah	Jumlah ABK	Jumlah Guru Pendamping Khusus	SK Penyelenggaran Pendidikan Inklusi
1	SDS Muhammadiyah	3	-	SK No 19 Tahun 2020
2	SDN 19 Tanjung Tengan	1	-	-
3	SDN 04 Nanga Pinoh	1	-	-
4	SDN 14 Kelakik	1	-	-
5	SDN 09 Tanjung Lay	1	-	-

Sumber: Hasil penelitian 2020

Tabel 1 merupakan data sekolah yang memiliki ABK dan Surat Keputusan (SK) penyelenggaraan pendidikan inklusi. Dari lima sekolah dasar, hanya satu yang memiliki SK penyelenggaraan pendidikan inklusi dalam melaksanakan pendidikan inklusi yaitu SDS Muhammadiyah Nanga Pinoh. Untuk melancarkan proses belajar mengajar sekolah dasar negeri dan swasta khususnya SDS Muhammadiyah selama ini masih menggunakan kurikulum yang sama dengan siswa regular yaitu kurikulum nasional, karena belum ada kurikulum khusus yang digunakan bagi penyandang anak berkebutuhan khusus. Proses belajar mengajar menyesuaikan dengan kondisi siswa, dalam memberikan latihan soal di sekolah.

Sejalan dengan pendapat Aslan (2017: 116) bahwa guru dalam merancang silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran pelaksanaan dalam kurikulum ABK harus sesuai dengan ketidakmampuan yang dialami oleh siswa, guru yang mengajar ABK harus dapat membedakan ketidakmampuan anak didiknya, dan jeli melihat situasi dan kondisi siswanya, sehingga dalam penanganan bagi ABK mengalami perbedaan dalam didikannya.



Gambar 2. SK Penyelenggara Pendidikan Inklusi SDS Muhammadiyah Nanga Pinoh

Karakteristik anak berkebutuhan khusus dapat dikategorikan ke dalam 3 tingkatan, yaitu: (1) *higher-incidence disabilities*, seperti gangguan berbicara/bahasa, kesulitan belajar, retardasi mental, dan gangguan emosional, (2) *lower-incidence disabilities*, dengan kategori kecacatan mental seperti tunanetra, tunarungu, cacat fisik, dan gangguan lainnya, dan (3) kebutuhan belajar khusus lainnya dapat dikategorikan seperti anak yang hiperaktif, kelainan perilaku, dan anak berbakat atau jenius (Rasmitadila, 2020: 23-46). Dari ketiga kategori anak berkebutuhan khusus yang ada di lima sekolah dasar negeri dan swasta di Nanga Pinoh bervariasi mulai dari gangguan bicara, kesulitan belajar yang memiliki karakteristik berbeda antara anak satu dengan anak yang lainnya, dan keterbelakangan mental, salah satunya *down sindrom*.

Tabel 2. Karakteristik ABK di Sekolah Dasar Nanga Pinoh

No.	Sekolah	Jumlah ABK	Karakteristik ABK
1	SDS Muhammadiyah	3	Gangguan bahasa, kesulitan belajar, dan <i>down sindrom</i>
2	SDN 19 Tanjung Tengah	1	Kesulitan belajar
3	SDN 04 Nanga Pinoh	1	<i>Down sindrom</i>
4	SDN 14 Kelakik	1	Kesulitan belajar
5	SDN 09 Tanjung Lay	1	Hiperaktif

Sumber: Hasil Penelitian 2020

Beragam karakteristik anak berkebutuhan khusus yang sekolah pada sekolah dasar negeri dan swasta di Nanga Pinoh, beragam pula cara penanganan, pelayanan, dan pendampingan yang diberikan sekolah kepada ABK. Sehingga, guru dan wali kelas

yang menangani dan mendampingi membutuhkan keterampilan lebih dalam penanganan ABK, karena sekolah tidak memiliki guru pendamping khusus.

3.1.2 Tindakan Sekolah dalam Mencapai Tujuan

Berdasarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pasal 8, bahwa pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar siswa. Guru seharusnya merancang proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk terlibat dalam proses belajar di kelas. Pendidikan inklusif perlu mempersiapkan sumber daya manusia (tutor khusus), infrastruktur yang mendukung pelaksanaan proses pembelajaran inklusif, adanya daya dukung pendanaan yang baik, sehingga pembelajaran inklusif proses berjalan efektif, membuat pedoman standar untuk pelaksanaan pembelajaran inklusif dengan modifikasi kurikulum, persiapan Program Pembelajaran Individu (PPI), dan standar penilaian untuk siswa berkebutuhan khusus (Mansur, Yasin, Warni, & Utama, 2021: 4094).

Kegiatan proses belajar mengajar bagi ABK di lima sekolah dasar negeri dan swasta di Nanga Pinoh tiap sekolah memiliki karakteristik masing-masing, ada sekolah yang guru atau wali kelas selama ini melakukan proses belajar mengajar bagi anak penyandang berkebutuhan khusus sama dengan anak non-ABK, dan ada yang mengajar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa.

Bagi SDN 19 Tanjung Tengah, SDN 04 Nanga Pinoh, SDN 14 Kelakik, dan SDN 09 Tanjung Lay, karakteristik proses pembelajaran secara umum sama bagi anak penyandang berkebutuhan khusus dengan non-ABK, dikarenakan anak penyandang berkebutuhan khusus yang bersekolah masih pada karakteristik ABK yang ringan dengan jumlah kecil, sehingga guru atau wali kelas masih bisa mengatasi. Sedangkan, di SDS Muhammadiyah guru/wali kelas proses pembelajaran yang diberikan bagi anak penyandang berkebutuhan khusus dengan non-ABK hampir memiliki kesamaan dengan sekolah dasar negeri lainnya, mulai dari metode, materi, isi pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Akan tetapi, yang membedakan pada saat memberikan penjelasan mulai dari yang sederhana sampai dengan yang dipahami oleh siswa dan latihan soal untuk anak penyandang berkebutuhan khusus lebih sederhana dibanding dengan non-ABK, sesuai dengan tingkatan kebutuhan dan kemampuan siswa, selain itu kepala sekolah juga ikut terlibat dalam memberikan bimbingan kepada anak penyandang berkebutuhan khusus karena tidak adanya guru pendamping khusus. Dalam proses pembelajaran, sebaiknya guru melakukan modifikasi mulai dari aspek materi yang disampaikan hingga metode pembelajaran yang digunakan (Angreni & Sari, 2020: 150). Dengan dilaksanakannya modifikasi dalam proses pembelajaran, dapat menghindari kebingungan siswa dalam belajar hingga menjawab soal yang diberikan guru.

Keterbatasan guru pendamping khusus, pemahaman guru tentang anak berkebutuhan khusus, sarana prasarana, dan pembiayaan sebagai pendukung pelaksanaan pendidikan inklusi di SDS Muhammadiyah Nanga Pinoh tidak menghambat terselenggaranya pendidikan inklusi, tindakan tersebut dapat terlaksana berkat adanya dukungan dan kerjasama antar sekolah dan orang tua murid anak berkebutuhan khusus dan non-ABK.

Selain itu untuk kedepannya SDS Muhammadiyah Nanga Pinoh akan membuat program pembelajaran individual, melaksanakan proses belajar mengajar sesuai kurikulum penyandang anak berkebutuhan khusus, mengikuti pelatihan terkait pendidikan inklusif bagi penyandang anak berkebutuhan khusus, mempelajari pedoman

penyelenggaraan pendidikan inklusi agar dapat melakukan perbaikan dan apa yang harus dilakukan kedepannya.

3.1.3 Pemeliharaan Menuju Keseimbangan

Pemeliharaan yang dilakukan sekolah dasar negeri dan swasta di Nanga Pinoh terhadap ABK tiap sekolah berbeda, untuk sekolah negeri kondisi saat ini sekolah hanya memberikan layanan dan perhatian dalam proses belajar mengajar di kelas dan selama di lingkungan sekolah, belum adanya upaya untuk menyediakan guru pendamping khusus karena jumlah ABK yang bersekolah di sekolah dasar negeri tersebut hanya satu sampai dengan dua orang, sehingga pemeliharaan belum bisa berkembang untuk kedepannya.

Kondisi SDS Muhammadiyah agar penyelenggaraan pendidikan inklusi dapat dilaksanakan, yaitu dengan tetap menerima anak berkebutuhan khusus, memberikan pelayanan dan pendampingan meskipun keterbatasan sumber daya dan komitmen. Agar anak penyandang berkebutuhan khusus dengan anak non-ABK dapat berinteraksi dengan sebagaimana mestinya, maka diperlukan pendampingan khusus, sehingga ABK tidak tersingkirkan dari lingkungan sosial.

Pengadaan dan pengusulan guru pendamping khusus atau minimal guru bimbingan konseling kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi, memberikan pembinaan, pelatihan, dan mengirim guru-guru untuk mengikuti workshop terkait pendidikan inklusi bagi anak penyandang berkebutuhan khusus. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kekurangan guru pendamping dan menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi serta proses belajar mengajar dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh sekolah, siswa, dan orang tua.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Adaptasi Sekolah terhadap Usulan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada SD di Nanga Pinoh

Penyelenggaraan pendidikan inklusi yang terdapat di SDS Muhammadiyah di Nanga Pinoh atas usulan yang diajukan oleh kepala sekolah dan idealnya seperti itu. Harapan besar bagi sekolah dasar negeri yang ada di Nanga Pinoh dapat mengikuti langkah yang dilakukan oleh SDS Muhammadiyah agar sekolah dasar negeri dapat menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga dapat menerima keberagaman ABK yang ingin sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi menyetujui dan memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan inklusi. Meskipun media dan pendukung pelaksanaan pendidikan inklusi yang minim, pelaksanaan pendidikan inklusi tetap terselenggara. Kondisi ini merupakan usaha yang dilakukan sekolah dan menjaga keseimbangan antara Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi, kepala sekolah, guru, siswa, dan masyarakat.

Usulan penyelenggaraan pendidikan inklusi yang dilakukan oleh SDS Muhammadiyah di Nanga Pinoh tanpa syarat, Dinas Pendidikan Melawi memberikan SK Penyelenggaraan pendidikan inklusi mengingat SDS Muhammadiyah di tahun sebelumnya memiliki anak berkebutuhan khusus agar mempermudah sekolah merancang program pelaksanaan pendidikan inklusi dan mendapatkan perhatian dari orang tua murid khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi, sehingga penyelenggaraan pendidikan inklusi diakui secara legal.

SK penyelenggaraan pendidikan inklusi dikeluarkan pada tahun 2020 di saat masa pandemi Covid-19, sehingga sekolah tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara maksimal baik bagi siswa non-ABK dan ABK. Penyelenggaraan pendidikan

pendidikan inklusi tidak dapat berjalan efektif. Pembelajaran dilakukan secara daring atau *online* dan anak lebih banyak belajar di rumah yang menuntut orang tua lebih ekstra dalam mendampingi anak-anaknya dalam belajar. Pembelajaran yang dilakukan selama masa pandemi Covid-19 lebih kepada pendidikan pola hidup bersih salah satunya tentang Covid-19 dengan beragam kegiatan yang disesuaikan dengan keadaan daerah terutama akses belajar di rumah (Milfayetty & Putri, 2020). Saat ini solusi yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu dengan menggunakan berbagai aplikasi dan memberikan materi serta latihan soal kepada semua siswa (*blended learning*), selain itu khusus bagi kelas rendah pembelajaran lebih pada pendampingan intensif dari orang tua agar proses pembelajaran lebih optimal (Dewi, 2020; Mansyur, 2020).

Sejalan dengan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus tentang panduan pembelajaran bagi penyandang disabilitas selama masa pandemi Covid-19, bahwa pelaksanaan pembelajaran bagi anak penyandang disabilitas termasuk anak berkebutuhan khusus dilaksanakan secara BDR (Belajar Dari Rumah) dengan dilaksanakan secara luring melalui radio, televisi, modul, atau secara daring melalui berbagai aplikasi pendukung baik secara tatap muka ataupun tidak tatap muka (Kemendikbud, 2020).

Adaptasi penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk pembelajaran kedepannya akan menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan kebutuhan siswa. Selama ini kurikulum yang digunakan adalah kurikulum sekolah reguler yang kedepannya kurikulum akan dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kemampuan atau kecerdasan siswa serta penyesuaian guru dalam menghadapi anak penyandang berkebutuhan khusus, sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana sesuai kurikulum yang dimodifikasi mulai dari modifikasi proses pembelajaran sampai evaluasi. Sejalan dengan pendapat Andini, Rahayu, Budiningsih, & Mumpuniarti (2020: 38) bahwa kurikulum yang dimodifikasi dibuat sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas baik dari tahap pembelajaran sampai pada evaluasi yang dilakukan, modifikasi kurikulum tersebut dapat dilaksanakan oleh tim pengembangan kurikulum yang terdiri dari guru-guru yang mengajar di kelas inklusif bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, terutama guru pendamping khusus. Sehingga kedepannya, penyelenggaraan pendidikan inklusi di SDS Muhammadiyah Nanga Pinoh dapat terselenggara sesuai dengan pedoman penyelenggaraan, baik dalam penyediaan guru pendamping khusus, sarana, dan prasarana, serta kurikulum yang sudah dimodifikasi dengan bantuan dari berbagai sumber dan membentuk tim dalam merumuskan kurikulum pendidikan inklusif.

3.2.2 Tindakan Sekolah dalam Pencapaian Tujuan

Tindakan yang dilakukan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi agar tercapai tujuan yang diinginkan yaitu sekolah tetap memberikan pelayanan bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus dengan melibatkan guru kelas dan wali kelas sebagai pendamping dalam proses pembelajaran, menggunakan sarana dan prasana seadanya yang ada di sekolah. Sekolah berusaha memberikan layanan yang maksimal dan memikirkan kualitas pelaksanaan pendidikan inklusi dengan keterbatasan sumber daya. Untuk kedepannya, sekolah memberikan atau mengirim guru untuk mengikuti pelatihan/seminar terkait pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus dan menyediakan guru pendamping minimal guru bimbingan konseling, selain itu sekolah

akan membuat program pembelajaran individual, mendiagnosa anak penyandang berkebutuhan khusus sesuai karakteristiknya, dan melakukan *assessment* dengan karakteristik ABK dari yang ringan sampai yang tinggi.

Agar tindakan dalam mencapai tujuan tersebut tercapai, maka kepala sekolah sebagai sub sistem dari sekolah perlu menjaga komitmen dari berbagai pihak, terutama guru sebagai pendamping dalam memberikan layanan dan bimbingan untuk tetap menyelenggarakan pendidikan inklusi meskipun dengan kekurangan dan minimnya sumber daya pendukung.

3.2.3 Pemeliharaan Menuju Keseimbangan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fernandes (2017: 119) menjelaskan bahwa pemeliharaan yang dilakukan oleh sekolah di Kota Padang tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi dengan menjaga keseimbangan dengan sistem lainnya dan beradaptasi dengan lingkungan. Sedangkan, hasil penelitian di SDS Muhammadiyah Nanga Pinoh diperoleh bahwa untuk memelihara penyelenggaraan pendidikan inklusi agar tetap seimbang, SDS Muhammadiyah di Nanga Pinoh tetap menerima dan memberikan pelayanan dan pendampingan khusus untuk anak berkebutuhan khusus yang sangat membutuhkan, meskipun keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana serta menjaga komitmen antara guru, sekolah, dan orang tua. Untuk SDN 19 Tanjung Tengah, SDN 04 Nanga Pinoh, SDN 14 Kelakik, dan SDN 09 Tanjung Lay dalam pemeliharaan menuju keseimbangan akan berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan, karakteristik anak penyandang berkebutuhan khusus dan kerjasama dengan orang tua.

4. Simpulan

Hasil penelitian ini menemukan bahwa sekolah dasar yang memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan inklusi yaitu di SDS Muhammadiyah di Nanga Pinoh atas usulan yang diajukan oleh pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi dan ini merupakan suatu keidealan dalam proses pengajuan pelaksanaan pendidikan inklusi. Sedangkan untuk sekolah dasar negeri lainnya, belum memiliki SK penyelenggaraan pendidikan inklusi. Penyelenggaraan pendidikan inklusi yang diajukan tanpa syarat hanya memiliki anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SDS Muhammadiyah. Meskipun keterbatasan sumber daya, sekolah tetap menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan memberikan pelayanan dan pendampingan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu, sekolah berusaha melakukan berbagai pemeliharaan sistem dan tetap menjaga keseimbangan dengan sistem lainnya. Selain legalitas yang didapat, sekolah juga memerlukan kerjasama dan dukungan pemerintah untuk memberikan penyediaan sumber pendukung lainnya agar proses penyelenggaraan pendidikan inklusi sesuai dengan pedoman pelaksanaan.

Daftar Pustaka

- Agustin, I. (2019). Penerapan Identifikasi, Asesmen, dan Pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusi. *EduStream: Jurnal Pendidikan Dasar*, 3(2), 72–80. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpd/article/view/6550>
- Amka, A. (2018). *Media Pembelajaran Inklusi*. Nizamia Learning Center.
- Andini, D. W., Rahayu, A., Budiningsih, C. A., & Mumpuniarti. (2020). *Pengembangan*

-
- Kurikulum dan Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar*. PT. Kanisius.
- Angreni, S., & Sari, R. T. (2020). Identifikasi dan Implementasi Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Sumatera Barat. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 7(2), 145–153. [https://doi.org/10.24252/10.24252/10.24252/auladuna.v7i2a4.2020](https://doi.org/10.24252/10.24252/auladuna.v7i2a4.2020)
- Anjarsari, A. D., Efendy, M., & Sulthoni. (2018). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Jenjang SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Sidoarjo. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 1(2), 91–104. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v1n2.p91-104>
- Aslan. (2017). Kurikulum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). *Jurnal Studia Insania*, 5(2), 105–119. <https://doi.org/10.18592/jsi.v5i2.1358>
- Depdiknas. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Depdiknas.
- Depdiknas. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Depdiknas.
- Depdiknas. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*. Depdiknas.
- Dewi, W. A. F. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 55–61. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i1.89>
- Ediyanto, Atika, I. N., Kawai, N., & Prabowo, E. (2017). Inclusive Education in Indonesia from the Perspective of Widyaaiswara in Centre for Development and Empowerment of Teachers and Education Personnel of Kindergartens and Special Education. *IJDS: Indonesian Journal of Disability Studies*, 4(2), 104–116. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2017.004.02.3>
- Fernandes, R. (2017). Adaptasi Sekolah terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 4(2), 119–125. <https://doi.org/10.24036/scs.v4i2.16>
- Firman, F. (2020). Management of Inclusive Education Classes in One of the Elementary School in Jambi Province. *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 1(4), 485–491. <https://doi.org/10.31933/DIJDBM>
- Kemendikbud. (2020). *Panduan Pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Selama Masa Pandemi Covid-19*. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://pmpk.kemdikbud.go.id/read-news/panduan-pembelajaran-bagi-peserta-didik-penyandang-disabilitas-selama-masa-pandemi-covid19>
- Lundqvist, J., Westling, M. A., & Siljehag, E. (2016). Characteristics of Swedish Preschools that Provide Education and Care to Children with Special Educational Needs. *European Journal of Special Needs Education*, 31(1), 124–139. <https://doi.org/10.1080/08856257.2015.1108041>
- Mansur, H., Yasin, M. H. B. M., Warni, H., & Utama, A. H. (2021). The Development of Model Design Inclusive Education Learning. *Psychology and Education Journal*, 58(1), 4087–4095. <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.1470>
- Mansyur, A. R. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Dinamika Pembelajaran di
-

- Indonesia. *Education and Learning Journal*, 1(2), 113–123. <https://doi.org/10.33096/eljour.v1i2.55>
- Milfayetty, S., & Putri, U. N. (2020). Memberi Penguatan pada Guru Menerapkan Mindful Breathing dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di SD Inklusi Jalan Sei Petani No. 19, Medan. *Jurnal Vokasi*, 4(2), 113–119. <https://doi.org/10.30811/vokasi.v4i2.2002>
- Prasetya, H., Rahman, M., Adityawati, I. A., & Islamiyah, U. K. (2018). *Layanan Pembelajaran untuk Anak Inklusi: Memahami Karakteristik dan Mendesain Pelayanan Pembelajaran dengan Baik*. CV. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Putro, S., Suharto, T., & Maslamah. (2020). The Implementation of Education Management at Islamic Inclusive Elementary School at Solo Indonesia. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(7), 6490–6501. https://ejmcm.com/article_6087.html
- Rasmitadila. (2020). *Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Rasmitadila, & SuryantiTambunan, A. R. (2018). Readiness of General Elementary Schools to Become Inclusive Elementary Schools: A Preliminary Study in Indonesia. *International Journal of Special Education*, 33(2), 366–381. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1185707>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tran, C. V., Pham, M. M., Mai, P. T., Le, T. T., & Nguyen, D. T. (2019). Inclusive Education for Students with Autism Spectrum Disorder in Elementary Schools in Vietnam: The Current Situation and Solutions. *International Electronic Journal of Elementary Education*, 12(3), 265–273. <https://doi.org/10.26822/ieje.e.2020358220>
- Tuncay, A. A., & Kizilaslan, A. (2021). Pre-Service Teachers' Sentiments, Attitudes and Concerns about Inclusive Education in Turkey. *European Journal of Special Needs Education*, 1–14. <https://doi.org/10.1080/08856257.2021.1873524>